



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERTANIAN
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan ini memuat kegiatan yang telah kami lakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan pada tahun 2023. Laporan ini sangatlah penting untuk mengetahui capaian kegiatan, kendala dan hambatan yang di hadapi, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang. Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam- dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun LKjIP pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

Kami menyadari LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Semoga laporan ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan.



Tabanan, 9 Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan
I Made Subagia, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GRAFIK		v
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi		4
1.3 Struktur Organisasi		4
1.4 Sistematisa Penyajian		10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		12
2.1 Rencana Strategis		12
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis		12
2.1.2 Indikator Kinerja Utama		13
2.2 Program, Kegiatan dan penetapan Kinerja Tahun 2023		14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022		24
3.1 Akuntabilitas Kinerja		24
3.2 Capaian Kinerja Organisasi		27
3.3 Analisis Capaian Kinerja		29
3.4 Telaah Laporan Kinerja Kementrian pertanian Republik Indonesia Tahun 2021		47
3.5 Telaah Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lain (Jembrana) Tahun 2021		49
3.6 Telaah Laporan Kinerja Provinsi Bali Tahun 2022		51
BAB IV PENUTUP		52
4.1 Kesimpulan		52
4.2 Saran		52

Lampiran A. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Pertanian Kab Tabanan

Lampiran B. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2021

Lampiran C. Lampiran Surat Keputusan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama	12
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2023	15
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022	27
Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Produksi Tanaman Pangan	29
Tabel 3.3 Data Produksi Padi, Jagung, Kedelai	30
Tabel 3.4 Produksi Komoditas Perkebunan	31
Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Produktivitas Tanaman Pangan	32
Tabel 3.6 Data Series Perkembangan Padi di Kab. Tabanan	34
Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Produktivitas Komoditas Perkebunan	35
Tabel 3.8 Data Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	37
Tabel 3.9 Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2023	38
Tabel 3.10 Hasil Vaksinasi Rabies di Kabupaten Tabanan Tahun 2022	39
Tabel 3.11 Hasil Vaksinasi PMK Pada Kambing	40
Tabel 3.12 Hasil Vaksinasi Sapi	40
Tabel 3.13 Hasil Vaksinasi Babi	41
Tabel 3.14 Data Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2023 Kabupaten Tabanan	41
Tabel 3.15 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kabupaten Tabanan	45
Tabel 3.16 Capaian Program dan Kegiatan Sesuai DPA Dinas Pertanian Tahun 2023	39
.....	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Tabanan	30
Grafik 3.2 Perkembangan Produksi Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya mengembangkan sektor pertanian dimana upaya yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan yang berbasis komoditas unggulan dengan melibatkan langsung peran aktif kelompok tani. Pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk dan bukan lagi pengembangan komoditas serta lebih difokuskan pada pengembangan nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustry yang berdaya saing. Permasalahan yang sering timbul antara lain penguasaan data informasi di lapangan, kelembagaan sumber daya manusia, sarana alat dan mesin pengolahan dan penguasaan teknologi pengendalian mutu hasil.

Pengembangan serta strategi pertanian kedepan adalah

pengembangan yang diarahkan bagi terwujudnya sentra-sentra produksi dan terintegrasi dengan industry ikutannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan mulai dari hulu hingga ke hilir seperti: perencanaan sistem, pembinaan sistem, penyediaan peralatan dan mesin, pengolahan, modal kerja, pelatihan kerjasama kemitraan, pengendalian dan pendampingan secara berkelanjutan.

Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang

dilakukannya. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak yang ditimbulkannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek inputs, outputs, tapi juga sampai pada out comes, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini, pada dasarnya berupaya untuk menjawab sasaran RPJMD kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Petanian Kabupaten Tabanan. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab/kewenangan OPD, maka setiap tahun setiap opd wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu, perlu pula memperhatikan:

- Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing SKPD serta memuat baik

keberhasilan maupun kegagalan.

- Prinsip Prioritas, yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban SKPD yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
- Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. LKjIP mencerminkan kinerja PD bersangkutan selama satu tahun anggaran yang berbasis kinerja artinya pelaksanaan kegiatannya terukur, teruji dengan sasaran yang jelas.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai tugas adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

1.3 Struktur Organisasi

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang prasarana dan sarana,
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:
 - Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;
- Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;
- Monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pertanian;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- Koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- Koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- Pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada

bidang sarana dan prasarana;

- Penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
 - Pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
 - Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - Penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - Pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;
 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
 - Penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;
 - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik

(SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;

- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan kegiatanpeningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatanpengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penyuluhan;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;
- Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*). Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*). Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan

perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja untuk Tahun 2023.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

Lampiran-Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan beserta indikatornya untuk masing-masing Misi, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama

MISI Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Misi III)		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial – ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
		Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian

	kebudayaan (Madani)		Meningkatkan Prasaranadan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana dan sarana Pertanian
			Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi secara berkala dalam mencapai sasaran strategis organisasi, maka Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pertanian serta RPJMD Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas	100%

	Daerah	dan fungsi PD	
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	97%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	50%

Sumber: Renstra Dinas Pertanian

2.2 Program, Kegiatan, dan Penetapan Kinerja Tahun 2023

Di tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengelola 14 kegiatan dan 31 subkegiatan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan dalam dibawah.

Dari dana yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 serta rencana target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menetapkan target kinerja yang akan dicapai di tahun 2023.

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	2023
						Rp APBD

		URUSAN PERTANIAN				38,962,212,448
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator : Persentase Peningkatan nilai SAKIP	Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		601,225,594	100%	32,229,787,017
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000 3,000,000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggara nya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		100%	24.490.201.423
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 orang/bulan%	24.477.711.423
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 dokumen	9.997.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPDIndikator: Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2.493.000
			Administrasi		100%	132.122.400

Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggara nya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.102.800
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.216.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.748.700
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.210.900
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	990.000
	Penyediaan Bahan/Material Indikator: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	55.219.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	19.635.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	0
Pengadaan		100%	23.971.400

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	23.971.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	1.410.132.100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	9.055.000
	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	186.497.700
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.214.579.400
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharaan ya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	199.575.920
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 unit	97.312.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	42.263.920

				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		60.000.000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian			10%	4.486.580.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian		65%	2.425.580.000
				Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian Indikator: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	2.275.580.000
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator:Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	150.000.000
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya		5 jenis	250.000.000
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	0
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	0	50.000.000
				Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman Indikator: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	200.000.000
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang		15 ekordan18500 pohon/Ste k	1.811.000.000

			sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator : Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	15 ekor	1.811.000.000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator : Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan			10%	8.465.368.400
			Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		58%	1.365.368.400
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B Indikator: Tersusunnya Perda Lp2B, KP2B dan LCP2B	n/a	0
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	n/a	0
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1.323.365.000
				Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Indikator: Tersedianya Data Statistik Pertanian	1 Tahun	42.003.400
				Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Indikator: Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	5 Unit	0

		Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatkan Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik		137 unit	7.100.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	82 unit	0
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 unit	0
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	72 unit	7.100.000.000
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Indikator: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 unit	0
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Pintu Air dalam Kondisi Baik	16 unit	0
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Indikator: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 unit	0

				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Indikator: Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 unit	0
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya Indikator: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	0
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Peternakan Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner			99%	816.725.000
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		17000 ekor	776.725.000
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	10 Laporan	0
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	776.725.000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan		140 dokumen	40.000.000

			Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	140 dokumen	40.000.000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Indikator: Meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh			60%	686.000.000
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas		39%	686.000.000
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 unit	265.000.000
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Indikator: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 unit	421.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan penilaian kinerja akan diukur melalui penerapan sistem tersebut, sehingga hal ini dapat menggambarkan suatu sistem yang salingberkaitan antara satu sama lainnya.

Dalam upaya mewujudkan misi ke-3 bupati terpilih, setelah DPA disahkan Dinas Pertanian menyusun penetapan kinerja, sasaran strategis dan realisasi pada akhir tahun. Untuk mengetahui keberhasilan dari sasaran maka dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja pada Dinas Pertanian dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan

program/kegiatan serta faktor yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja. Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan kegiatan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian. kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisa tersebut meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / hambatan pencapaian target.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah menjadi

Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut:

1). Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

2). Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3). Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

4). Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Kabupaten. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Serta menguraikan mengenai hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 3.2

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Formula	Capaian
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Jumlah Realisasi dibagi dengan anggaran dikalikan seratus persen	85,18%
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	Produksi tahun ini dikurangi produksi tahun sebelumnya dibagi produksi tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: (-0,12%) Jagung: (-0,16%) Kedelai: (186,1%)
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%	Produktivitas tahun ini dikurangi produktivitas	Padi: (-0,013%) Jagung: (25,53%) Kedelai (21,66%)

				tahun sebelumnya dibagi produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	97%	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi Jumlah ternak dikalikan seratus persen	96,6%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	50%	Jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dibagi total kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dikalikan	63,57%

3.3 Analisis Hasil Capaian Kinerja (per sub kegiatan)

Sasaran 2.1 Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan

Dari sasaran meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan, dengan indikator persentase peningkatan Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dengan menggunakan formula $\text{Produksi tahun 2023} - \text{produksi tahun 2022}$, kemudian selisih ini dibagi dengan produksi tahun 2022.

Tabel 3.2
Hasil Perhitungan Produksi Tanaman Pangan

Komoditas Pertanian	Produksi Tahun 2021 (ton)	Produksi Tahun 2022 (ton)	Produksi Tahun 2023 (ton)	Persentase Peningkatan Produksi(%)
Padi	197.933	210.095	184.883	-0,12%
Jagung	12.713	14.680	12.262	-0,16%
Kedelai	395	639	1.828	186,1%

Sumber: Data Diolah

Produksi padi tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2022. Dengan persentase penurunan produksi sebesar 0,12%. Begitu pula dengan komoditas unggulan lainnya jagung. Dimana jagung juga mengalami penurunan produksi. Dimana jagung menurun sebesar 0,16 persen. Hal ini karena adanya kekeringan dan kemarau panjang yang menyebabkan penanaman tertunda. Disamping itu karena adanya panen muda jagung, sehingga turut mengurangi jumlah produksi jagung. Untuk komoditas kedelai mengalami peningkatan sebesar 186,1 persen. Hal ini karena sepanjang tahun 2023 terdapat proyek tanam komoditas kedelai sebesar 907 Ha yang ditanam di

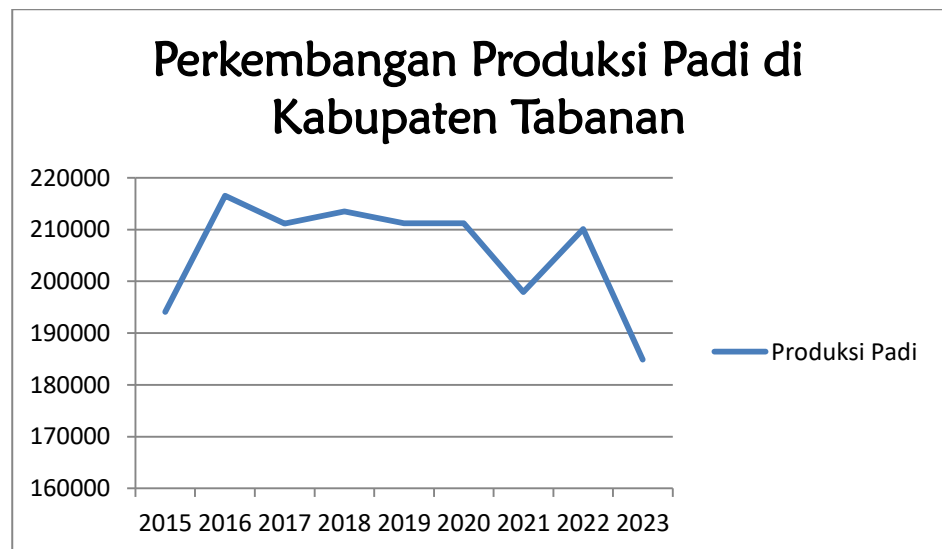
kecamatan Tabanan seluas 650 Ha, di kecamatan Kediri seluas 257 Ha, sedangkan di Baturti ditanam secara swadaya seluas 2 Ha.

Tabel 3.3 Data Produksi Padi, Jagung, Kedelai

Komoditas Unggulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Padi (ton)	194.122	216.547	211.178	213.482	211.243	211.243	197.933	210.095	184.883
Jagung (ton)	5.035	7.369	8.691	8.901	8.691	1.440	12.713	14.680	12.262
Kedelai (ton)	679	1.280	1.107	2.411	1.896	153	395	639	1.828

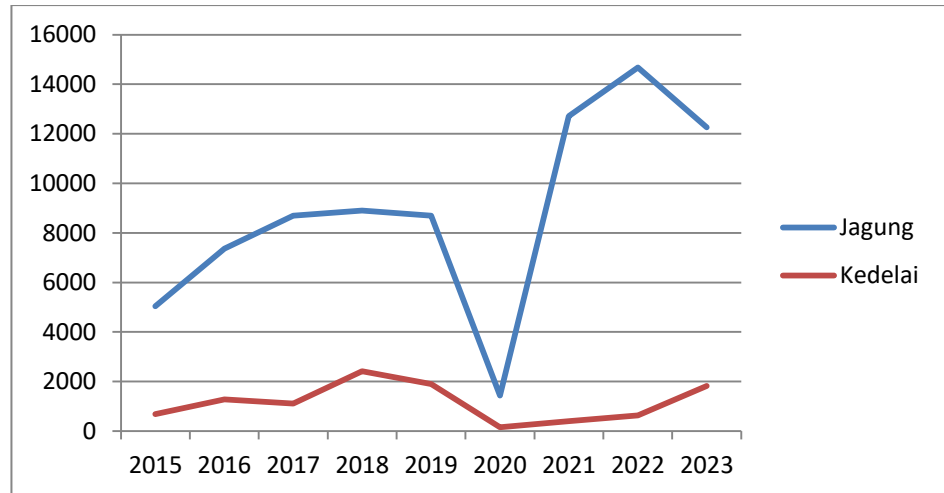
Secara umum produksi padi, jagung dan kedelai kalau dituangkan ke dalam grafik perkembangan produksi seperti grafik dibawah.

Grafik 3.1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Tabanan



Sumber: Data Diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Produksi Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan



Sumber: Data Diolah

Untuk produksi komoditas perkebunan sesuai dengan data pada tabel dibawah

3.4 Tabel Produksi Komoditas Perkebunan

No	JENIS KOMODITAS	Luas Areal Tanaman Menghasilkan (Ha)			Produksi (Ton)			Persentase Peningkatan Produksi
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	KELAPA HYBRIDA	2,00	2,00	2,00	1,27	0,30	1,39	3,63
2	KELAPA GENJAH	330,75	342,63	342,63	244,79	251,36	258,51	0,03
3	KELAPA DALAM	12.901,00	12.911,50	13.038,50	14.918,66	15.165,29	15.126,87	0,00
4	KAKAO	3.303,87	3.342,97	3.710,97	878,70	942,06	1.048,54	0,11
5	KOPI ARABIKA	705,55	600,55	450,55	27,30	24,14	23,02	-0,05
6	KOPI ROBUSTA	8.253,60	8.387,08	8.537,08	5.589,12	5.327,27	5.062,25	-0,05
7	CENGKEH	1.825,41	1.854,81	1.854,81	163,02	145,05	170,64	0,18
8	PANILI	-	-	-	-	-	-	-
9	LADA	-	-	-	-	-	-	-
10	KEMIRI	16,20	20,74	20,74	10,34	11,04	11,54	0,05
11	PALA	11,06	38,56	38,56	8,50	8,80	8,89	0,01
12	AREN	110,11	110,11	110,11	8,63	9,45	98,73	9,45

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Secara umum produksi komoditas perkebunan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Hanya kopi Arabica dan kopi robusta yang mengalami penurunan produksi dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk komoditas lain secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Terutama kelapa hybrid yang meningkat 3,63% dan aren sebesar 9,45%. Beberapa komoditas perkebunan lain mengalami peningkatan produksi akan tetapi persentase peningkatannya tidak mencapai satu persen.

Sasaran 2.1 Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Dari sasaran peningkatan prasarana dan sarana pertanian dengan indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dimana didapat dari perhitungan produktivitas tahun berlaku di kurangi produktivitas tahun sebelumnya, dibagi dengan produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen. Dimana hasil perhitungan produktivitas tanaman pangan sesuai dengan table dibawah

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Produktivitas Tanaman Pangan

Komoditas Pertanian	Produktivitas Tahun 2022 (kw/ha)	Produktivitas Tahun 2023	Persentase Peningkatan Produktivitas
Padi	57,81	57,08	-0,013%
Jagung	58,60	73,56	25,53%
Kedelai	16,53	20,11	21,66%

Sumber: Data Statistik Pertanian

Produktivitas padi dipengaruhi oleh luas tanam padi. Dimana sepanjang tahun 2023 luas tanam padi mengalami penurunan akibat adanya kekeringan dan kemarau panjang,

sehingga penanaman tidak dapat dilaksanakan. Juga terdapat proyek tanam komoditas diluar tanaman padi seperti tanam jagung seluas 1.696 Ha dan proyek tanam kedelai seluas 909 Ha dan proyek Bawang merah seluas 20 Ha di Kediri, Bawang putih seluas 20 Ha yang dilaksanakan di kecamatan Penebel, proyek cabe di kecamatan Baturiti seluas 30 Ha, dan di kecamatan Marga seluas 10 Ha. Produktivitas juga dipengaruhi oleh teknik budi daya, jarak tanam dan proses perhitungan sample ubinan, anakan per rumpun, jumlah serangan, jenis varietas, penggunaan pupuk kurang tepat.

Jagung mengalami peningkatan produktivitas karena lokasi pengambilan ubinan yang mendukung, penggunaan pupuk berimbang, system perawatan yang intensif.

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung. Komoditas ini memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan yang kaya protein nabati dan sebagai bahan baku industri pakan ternak. Selain sebagai sumber protein nabati, kedelai merupakan sumber lemak, mineral, dan vitamin serta dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti tahu, tempe, tauco, kecap, dan susu. Untuk produktivitas komoditas kedelai, produktivitas mengalami peningkatan karena adanya bantuan pemerintah, penggunaan benih bermutu, pembuatan saluran drainase, pengaturan populasi, pengendalian OPT, pengolahan lahan yang baik dan pemupukan sesuai kebutuhan.

Tabel 3.6
Data Series Perkembangan Padi di Kab. Tabanan

No	URAIAN	Tahun													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	L. Tanam (Ha)	44.701	41.411	40.916	42.827	32.600	33.040	46.084	37.386	36.855	34.783	37.075	37.882	33.091	31.625
	L Panen Bersih	41.637	40.789	39.415	41.612	36.892	32.374	39.603	36.809	36.840	37.266	33.065	36.864	34.903	31.130
	Produktivitas (Ku/Ha)	56,10	52,09	56, 49	56,16	58,07	59,96	56,10	57,37	58,04	55,81	64.24	53,75	57,81	57,08
	Produksi (Ton)	233.602	212.481	222.659	233.690	214.203	194.122	216.547	211.178	213.482	211.243	211.243	197.933	210.095	184.882
2	Produksi Beras	102.235	107.629	112.665	118.251	111.394,10	104.766	115.249	113.969	113.405	112.216	112.784	105,177	113.391	115.995
	Kebutuhan Beras (Ton)	60.450	61.978	63.052	63.271	56.322	49.700	49.700	50.281	50.281	50.281	50.817	51.421	51.000	44.757
	Surplus Beras	41.785	45.651	49.613	54.980	49.440	48.451	58.770	56.870	58.096	56.906	56.885	48.614	55.773	68.887

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Untuk persentase peningkatan produktivitas hasil perkebunan dengan menggunakan formula produktivitas tahun 2023 dikurangi produktivitas 2022, kemudian selisih ini dibagi dengan produktivitas tahun 2022.

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan Produktivitas Komoditas
Perkebunan

No	JENIS KOMODITAS	PRODUKTIVITAS			Persentase Peningkatan Produktivitas (%)
		2021	2022	2023	
1	KELAPA HYBRIDA	635	150	695	3,63
2	KELAPA GENJAH	740	734	754	0,03
3	KELAPA DALAM	1.19	1.17	1160	-0,01
4	KAKAO	274	282	283	0,00
5	KOPI ARABIKA	27	40	51	0,28
6	KOPI ROBUSTA	690	635	593	-0,07
7	CENGKEH	147	78	92	0,18
8	PANILI	0	0	0	0
9	LADA	0	0	0	0
10	KEMIRI	554	532	556	0,05
11	PALA	212	228	231	0,01
12	AREN	92	86	897	9,43

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Dari tabel dapat dilihat bahwa hampir semua produktivitas komoditas perkebunan mengalami peningkatan dari tahun 2022. Hanya kelapa dalam dan kopi robusta yang mengalami penurunan produktivitas. Hal ini disebabkan karena kualitas bibit yang rendah serta kurangnya penggunaan pupuk. Komoditas aren meningkat 9,43% dibandingkan dengan tahun 2022. Begitu pula dengan kelapa hybrida meningkat sebesar 3,63%. Untuk komoditas lain seperti kelapa genjah, kakao, kopi Arabica, cengkeh, kemiri dan pala juga mengalami peningkatan produktivitas. Hanya saja peningkatannya tidak mencapai satu persen. Hal ini karena iklim yang tidak mendukung di tahun 2023, dan adanya anomaly iklim. Pengendalian OPT dilakukan secara swadaya. Belum adanya petugas pengamat OPT di kabupaten.

Pengendalian OPT masih ditangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan utamanya kopi secara berkelanjutan. Permasalahan yang dialami terkait dengan rendahnya produktivitas tanaman yang masih rendah antara lain pemangkasan belum intensif, pengendalian OPT belum optimal, sanitasi kebun belum optimal, pemupukan belum maksimal, tanaman sudah tua dan kurang peremajaan. Langkah-langkah pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Tabanan antara lain:

- Peremajaan dan intensifikasi tanaman kakao
- Pengawasan dan pendampingan
- Pengendalian OPT dan penerapan PHT
- Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan
- Indikasi geografis
- Pemberdayaan petugas pengamat OPT
- Agroindustri komoditi kakao
- Pemasaran, akses pasar, dan pelayanan informasi pasar
- Pembinaan usaha komoditi kakao
- Sistem jaminan mutu
- Melakukan promosi

Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023

Berdasarkan data, dapat diamati bahwa sepanjang tahun 2023, Dinas Pertanian mengalokasikan tiga jenis pupuk yaitu Urea, NPK dan NPK Formula Khusus sesuai dengan yang tercantum dalam Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Dimana komoditas yang termasuk diantaranya Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe.

**Tabel 3.8 DATA REALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 (PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2023)**

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (kg)								
		Urea			NPK			NPK Formula Khusus		
		Alokasi	Realisasi	% Real	Alokasi	Realisasi	% Real	Alokasi	Realisasi	% Real
1	Selemadeg Barat	510.600	185.200	36,27	243.000	133.600	54,98	326.000	72.850	22,35
2	Selemadeg	1.042.446	426.600	40,92	749.097	352.850	47,10	23.299	1.750	7,51
3	Selemadeg Timur	1.050.900	564.802	53,74	1.094.717	587.926	53,71	4.699	-	-
4	Kerambitan	1.007.172	678.657	67,38	1.130.049	760.491	67,30	-	-	-
5	Tabanan	1.027.761	649.185	63,16	776.600	518.244	66,73	-	-	-
6	Kediri	1.290.365	1.071.212	83,02	1.024.700	863.429	84,26	-	-	-
7	Marga	913.600	608.450	66,60	789.300	524.862	66,50	-	-	-
8	Baturiti	982.000	533.650	54,34	741.800	416.750	56,18	-	-	-
9	Penebel	1.556.000	1.245.250	80,03	1.342.200	969.900	72,26	-	-	-
10	Pupuan	273.000	191.723	70,23	502.700	193.850	38,56	-	-	-
	Jumlah :	9.653.844	6.154.729	63,75	8.394.163	5.321.902	63,40	353.998	74.600	21,07

Pembangunan prasarana yang dilakukan sepanjang tahun 2023 yakni sesuai tabel dibawah:

Tabel 3.9 Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2023

No	Jenis Prasarana	Jumlah Pembangunan
1	Pembangunan Jalan Produksi Peternakan	1 Paket
2	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	1 Paket
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Hortikultura	1 Paket
4	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi	1 Paket
5	Pembangunan/ Rehabilitasi Dam Parit	1 Paket
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	2 Paket
7	Perbaikan Jalan Usaha Tani	1 Paket
8	Rabat Beton Jalan Usaha Tani	1 Paket
9	Pengadaan mesin Slip	1 Paket
	Pengadaan Traktor	2 Paket
10	Pengadaan alat Pertanian	1 Paket

Sasaran 2.3 Meningkatkan Produktivitas Peternakan

Dari sasaran Meningkatkan Produktivitas Peternakan dengan indikator persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Dalam hal pelayanan kesehatan hewan selain dilakukan vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan, juga dilakukan pemberian obat-obatan untuk ternak sapi di kelompok ternak serta melakukan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku. Munculnya penyakit kuku dan mulut pada bulan Juli 2022 sehingga perlu dilakukan kegiatan pencegahan, pengendalian dan

penanggulangan. Arahkan dari menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dan Satgas PMK bahwa sebelum pelaksanaan G20 tanggal 13 November 2022 pelaksanaan cakupan vaksinasi PMK sudah mencapai 80% pada hewan rentan PMK (sapi, kerbau, kambing dan babi).

Rabies adalah salah satu penyakit yang bersifat zoonosis atau dalam kata lain bisa menular dari hewan ke manusia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Tak hanya menyerang anjing, tetapi mamalia berdarah panas juga memiliki risiko tinggi dalam penularan penyakit rabies ini. Rabies ini bisa menyerang hewan sejak lahir. Maka dari itu, perlu dilakukan vaksinasi rabies sejak dini demi mencegah terjangkitnya virus tersebut bagi para hewan peliharaan. Tingkat efektivitas vaksin rabies ini 100%, sehingga sangat penting dilakukan sebagai langkah awal pencegahan rabies.

Tabel 3.10 Hasil Vaksinasi Rabies di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

KECAMATAN	POPULASI ANJING	HASIL VAKSINASI Rabies				Cakupan
		ANJING	KUCING	MONYET	TOTAL VAKSINASI	(%)
Baturiti	5.500	4.462	0	0	4.462	81,13
Kediri	7.917	6.318	63	0	6.381	79,81
Kerambitan	6.764	5.882	18	0	5.900	86,96
Marga	4.934	4.702	18	0	4.720	95,30
Penebel	6.974	5.545	1	0	5.546	79,51
Pupuan	6.902	3.433	173	1	3.607	49,74
Selemadeg	4.359	3.055	35	0	3.090	70,09

Selemadeg Barat	6.124	3.946	15	0	3.961	64,44
Selemadeg Timur	4.326	3.862	65	0	3.927	89,27
Tabanan	8.304	5.296	36	0	5.332	63,77
TOTAL	62.104	46.501	424	1	46.926	74,88

Sumber: Statistik Peternakan

Hasil Vaksinasi PMK

Tabel 3.11 Hasil Vaksinasi PMK Pada Kambing

No	Kabupaten	Kecamatan	Estimasi Populasi	Hasil Vaksinasi			Total Vaksinasi
				I	II	Boster	
1	Tabanan	Baturiti	66				
2		Kediri	144				
3		Kerambitan	33				
4		Marga	374				
5		Penebel	280				
6		Pupuan	431	160	14		174
7		Selemadeg	309	7			7
8		Selemadeg Barat	305				
9		Selemadeg Timur	1.170	4			4
10		Tabanan	1.384				
		TOTAL	4.496	171			185

Tabel 3.12 Hasil Vaksinasi Sapi

No	Kabupaten	Kecamatan	Estimasi Populasi	Hasil Vaksinasi			Total Vaksinasi
				I	II	Boster	
1	Tabanan	Baturiti	12.325	2.005	5.397	96	7.498
2		Kediri	5.997	568	220	1.322	2.110
3		Kerambitan	3.607	1.154	961	540	2.655
4		Marga	1.713	954	2.444	1.030	4.428
5		Penebel	1.073	943	4.797	0	5.740
6		Pupuan	1.713	37	128	36	201
7		Selemadeg	3.008	557	648	4	1.209

8		Selemadeg Barat	4.688	371	368	0	739
9		Selemadeg Timur	4.172	519	1.032	0	1.551
10		Tabanan	433	789	180	553	1.522
		TOTAL	38.729	7.897	16.175	3.581	27.653

Tabel 3.13 Hasil Vaksinasi Babi

No	Kabupaten	Kecamatan	Estimasi Populasi	Hasil Vaksinasi			Total Vaksinasi
				I	II	Boster	
1	Tabanan	Baturiti	13.670	5.350			5.350
2		Kediri	7.599	2.652			2.652
3		Kerambitan	3.959	2.836			2.836
4		Marga	3.550	3.850			3.850
5		Penebel	2.167	3.376			3.376
6		Pupuan	3.728				
7		Selemadeg	3.572				
8		Selemadeg Barat	3.145				
9		Selemadeg Timur	1.597	600			600
10		Tabanan	1.317	1.909			1.909
		TOTAL	44.304	20.573			20.573

**Tabel 3.14 Data Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2023
Kabupaten Tabanan**

NO	JENIS TERNAK	PERKEMBANGAN POPULASI		KETERANGAN NAIK/TURUN %
		2022 ekor	2023 ekor	
1	Sapi	38.729	38.988	Naik 0,67%
2	Kerbau	49	71	Naik 44,89 %
3	Kuda	0	9	Naik 100 %

4	Babi	44.304	31.903	Turun 27,93 %
5	Kambing	4.296	2.049	Turun 52,30 %
6	Ayam Buras	261.613	242.464	Turun 7,32 %
7	Ayam Ras Petelur	836.200	1.233.300	Naik 47,47 %
8	Ayam Ras Pedaging	2.224.683	1.859.900	Turun 16,39 %
9	Itik	51.255	46.734	Turun 8,82%

Sumber: Statistik Peternakan

Beberapa alasan peningkatan dan penurunan populasi ternak antara lain:

1. Ternak Sapi meningkat karena:

- Meningkatnya minat petani peternak untuk memelihara ternak sapi
- Ketersediaan pakan dan hijauan banyak tersedia dan adanya bantuan pemerintah untuk membantu petani dan kelompok ternak dalam hal pengadaan bibit sapi.
- Adanya terobosan pemerintah dalam perlindungan petani melalui program asuransi yang disubsidi oleh pemerintah sehingga petani ternak bisa terlindungi dari kerugian beternak
- Pelayanan kesehatan hewan terutama vaksinasi PMK sudah dilaksanakan secara rutin.

2. Ternak Kerbau meningkat karena:

- Ketersediaan pakan dan hijauan banyak tersedia

3. Ternak Kuda meningkat karena bergeliatnya sektor pariwisata setelah pandemic covid 19 sehingga pemeliharaan kuda adalah untuk menunjang pariwisata untuk rekreasi wisata alam

4. Ternak Babi turun karena masih rentannya penyakit pada babi dimana banyak perusahaan dan peternak babi belum berani memelihara babi dalam jumlah besar.

5. Ternak Kambing turun karena pemeliharaan kambing hanya ada di daerah pegunungan terutama di daerah selemadeg raya dan pupuan

serta masih adanya penyakit pada kambing dan pemeliharaan ternak kambing masih bersifat sambilan

6. Ternak Ayam Buras turun karena lahan pemeliharaan ayam buras berkurang dan vaksinasi ND belum dilaksanakan secara rutin
7. Ternak Ayam Petelur naik karena disebabkan harga telur yang meningkat mahal sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak serta adanya beberapa peternak yang mengalami peningkatan volume pemeliharaan yang menunjang pendapatan sehari-hari
8. Ternak Ayam Pedaging Turun karena tidak stabilnya harga pakan dengan harga ayam hidup sehingga fluktuasi harga terlalu cepat sehingga peternak mengurangi volume pemeliharaan serta masih adanya pasokan daging dari perusahaan di luar Bali sehingga berpengaruh terhadap harga ayam di Bali
9. Ternak itik turun karena
 - Harga pakan yang cenderung meningkat mahal dibandingkan harga berat hidup itik.
 - Pemeliharaan itik berskala besar tidak ada lagi karena memerlukan lahan luas dan bau masih menjadi permasalahan dasar bagi peternak
 - Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak itik ke sektor lain yang menunjang pendapatan sehari-hari.

Secara umum faktor yang dirasa menghambat pengembangan peternakan di Kabupaten Tabanan antara lain:

- Masih adanya pemilik anjing yang tidak mau memberikan anjingnya untuk diambil sampelnya walaupun anjing yang menggigit beresiko tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyakit rabies.
- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga

perlu ditertibkan lagi.

- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.
- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

Upaya yang ditempuh antara lain:

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak penyakit rabies perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dengan melibatkan jajaran dinas dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan.
2. Perlu dilakukan penertiban terhadap penjual obat hewan yang tidak memiliki ijin dari dinas teknis dan memasarkan obat yang kadaluarsa.
3. Untuk menumbuhkan kesadaran peternak tentang pentingnya kesehatan hewan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi secara terus-menerus baik melalui jalur formal maupun informal.
4. Pemotongan babi diluar RPH belum mempunyai penampungan limbah, disarankan untuk melakukan pemotongan di RPH sesuai dengan Perbub. Nomor 67 Tahun 2013.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Dinas Pertanian melalui bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan pangan asal hewan. Pemeriksaan ini mengeluarkan sertifikat Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Tahun 2022 jumlah SKKH yang dikeluarkan dapat dilihat dari tabel:

Tabel 3.15 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kabupaten Tabanan

NO	TAHUN	JUMLAH SKKH	JUMLAH BAP	KETERANGAN
1	Tahun 2023	659	0	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan. Untuk tahun 2023, hanya mengeluarkan SKKH saja
2	Jumlah 2022	8	268	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan
3	Jumlah 2021	0	263	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan
4	Jumlah 2020	71 6	11 0	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku, Daging olahan

Diharapkan dengan pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner meningkatkan derajat hewan di Kabupaten Tabanan.

Sasaran 2.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Perwujudan sasaran ini adalah Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Tabanan. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani.

Tahun 2023 penyuluh membina seluruh subak sawah, subak abian, kelompok tani, kelompok tani ternak, kelompok

wanita tani, gapoktan dan forum poktan dengan jumlah 236 subak sawah, 186 subak abian, 1.682 kelompok tani, 596 kelompok tani ternak, 72 Kelompok Wanita Tani, 254 gapoktan dan 20 forum poktan, rata-rata penyuluh membina poktan 18 poktan yang aktif (kisaran 16-20 poktan) Setiap penyuluh membina secara intensif 9 poktan untuk peningkatan kelas kemampuan kelompok (kisaran 5-10 poktan, ketentuan dari kemenpan) sehingga diperoleh target 9/18 dikalikan 100% = 50%

Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif. Perwujudan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun 2022 secara fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 97 %. Hal ini dapat tercapai karena Terlaksananya kegiatan penyuluh yang tepat guna, tersusunnya Programa Tk. Desa, Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten, Terlaksananya demplot pupuk hayati cair, untuk meningkatkan hasil petani yang berdampak pada penghasilan petani, untuk meningkatkan kualitas data kelembagaan penyuluh melalui paket data, dan mampu mendukung kegiatan operasional penyuluh yang ada di Kabupaten Tabanan.

Kelembagaan kelompok petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat

kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK), kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa tercapai 100 % dan realisasi keuangan tercapai 97,84 % karena Terseleksinya kelembagaan petani, Gapoktan, KEP dan mendorong penerapan teknologi petani secara berkelanjutan dan meningkatkan teknologi kelembagaan petani sehingga tersusunnya program Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani, melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan agar petani mampu menjadi wirausaha yang berprestasi, Terlaksananya penilaian kelembagaan petani secara berjenjang di Tingkat desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Terlaksananya seleksi Kelembagaan Ekonomi Petani, Poktan dan Gapoktan dan tercapainya target 1 juara tingkat Kabupaten mewakili ke untuk tingkat Propinsi Untuk Tahun 2022.

3.4 Telaah Laporan Kinerja Kementrian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2023

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan sektor pertanian, maka strategi pembangunan sektor pertanian dilakukan melalui:

1. Peningkatan kapasitas produksi komoditas prioritas;

2. Peningkatan diversifikasi pangan lokal;
3. Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan;
4. Modernisasi pertanian; dan
5. Gerakan tiga kali ekspor.

Strategi yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian yang diukur melalui pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022, yaitu: (1) meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, (2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, (3) meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, (4) meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan (5) terwujudnya birokrasi 4 Kementerian Pertanian Tahun 2022 Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel. Sebagai langkah implementasinya, Kementerian Pertanian telah menetapkan tiga belas kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas prioritas;
2. Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani; (
3. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/Food Estate;
4. Diversifikasi pangan lokal;
5. Pengembangan lumbung pangan dan sistem logistik pangan;
6. Pengembangan pertanian presisi dan smart farming;
7. Percepatan gerakan tiga kali ekspor;
8. Kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanian;
9. Transformasi penyerapan KUR;
10. Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian;
11. Pemulihan ekonomi nasional (PEN) sektor pertanian;
12. Penguatan simpul koordinasi manajemen pembangunan pertanian; dan

13. Pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan kawasan komoditas strategis, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan sinergi antar stakeholder di pusat maupun di daerah. Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain dengan meningkatnya produksi beberapa komoditas strategis yaitu: (1) produksi padi tahun 2022 mencapai 55,44 juta ton meningkat 1,88% dari tahun 2021; (2) produksi jagung mencapai 25,18 juta ton, meningkat 9,29% dari tahun 2021; (3) produksi cabai mencapai 3,05 juta ton meningkat 10,88% dari tahun 2021, (4) produksi aneka daging tahun 2022 mencapai 4,73 juta ton meningkat 14,46%. Nilai ekspor pertanian selama periode tahun 2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,79% dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2021, yang termasuk ekspor pertanian dalam bentuk segar maupun olahan. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional, Kementerian Pertanian Tahun 2022 sepanjang tahun 2022 juga menunjukkan tren yang meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 107,34 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,59 persen dibandingkan dengan nilai tahun 2021 yang rata-rata NTPnya sebesar 104,63.

3.5 Telaah Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lain (Trenggalek) Tahun 2023

Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah produksi tanaman pangan berupa padi dengan target 165651,43 ton, jagung dengan target 104658,99 ton, kedelai dengan target 1724,23 ton dan ubi kayu dengan target 144630,53 ton porang dengan target 219.000 ton.
- Jumlah produksi hortikultura berupa durian dengan target 11.666,34 ton, manggis dengan target 2.893,95 ton, alpokat dengan target 3.275,63 ton, cabai dengan target 166,65 ton, bawang merah dengan target 528,77 ton, Jahe dengan target 1.400 ton.

- Jumlah produksi tanaman perkebunan berupa kakao dengan target 1.034,2501 ton, kelapa dengan target 8.253,39 ton, kopi dengan target 302,86 ton, cengkeh dengan target 610,70 ton, nilam dengan target 1675,70 ton, tembakau dengan target 94,90 ton dan serai dengan target 729,46 ton.
- Peningkatan Kelembagaan Penyuluh 14
- Nilai RB Perangkat Daerah 79 8. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat 82.23 (A)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,5
- Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan 6 Unit
- Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Apokat) 46 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Bawang Merah) 89,7 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Cabai) 30,3 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Durian) 115 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Jahe) 105 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (Manggis) 54 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Jagung) 68,2 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Kedelai) 16,2 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Padi) 59,2 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Porang) 730 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman pangan (Ubi Kayu) 215 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Cengkeh) 2,50 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Kakao) 6,06 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa) 10,48 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Kopi) 10 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Nilam) 49,80 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Serai) 83,8401 Ku/Ha
- Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (Tembakau) 12,546 33.
- Jumlah prasarana yang dibangun/direhab pada tahun berkenaan 49 Paket
- Jumlah luas lahan yang terlindungi dari bencana pertanian dan berhasil diasuransikan 1000 Ha
- Jumlah kelembagaan Penyuluhan yang meningkat kapasitasnya pada tahun berkenaan 14 BPP
- Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 6.3%

3.6 Telaah Laporan Kinerja Provinsi Bali Tahun 2022

Dari data tahun 2022 dengan target peningkatan produktivitas sebesar 1% akan tetapi mengalami penurunan dengan realisasi sebesar -2,67% capaian kinerja -3,7% dengan katagori kurang dibandingkan dengan tahun 2021 hal ini disebabkan oleh tingginya luas panen pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 akan tetapi produksi 2022 turun dibandingkan 2021, selain luas tanam dan produksi unsure yang mempengaruhi produksi adalah iklim yakni curah hujan. Dimana curah hujan selama tahun 2022 mengalami bulan basah sepanjang tahun sehingga menyebabkan serangan OPT yang tinggi serta adanya bencana yang merusak komoditi tanaman pangan dan hortikultura.

Dari target indicator persentase peningkatan produktivitas perkebunan pada tahun 2022 sebesar 1%, akan tetapi mengalami penurunan produktivitas dengan realisasi 0,94%, capaian sebesar -0,06% berkatagori kurang jika dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan oleh menurunnya luas tanam yang diakibatkan banyak tanaman perkebunan yang usianya lebih dari 20 tahun atau katagori tua atau rusak serta produksi menurun akibat adanya anomai iklim tahun 2022 yakni curah hujan yang tinggi sehingga meningkatkan intensitas serangan OPT.

Dari target indicator peningkatan populasi ternak dengan target 0,8% tetapi mengalami penurunan dengan realisasi 0,61% serta capaian sebesar -0,19% dibandingkan dengan tahun 2021 dengan populasi 584.463 ST hal ini diakibatkan terjadinya serangan atau kasus penyakit PMK yang banyak menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau serta babi.

3.16 Capaian Program dan Kegiatan Sesuai DPA Dinas Pertanian Tahun 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Pertanian	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase Capaian
DINAS PERTANIAN	40,715,676,643	34,682,448,918	6,033,227,725	85.18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,261,003,243	20,653,272,621	5,607,730,622	78.65
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	3,797,603	1,202,397	75.95
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000	2,277,384	722,616	75.91
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	1,520,219	479,781	76.01
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24,490,201,423	19,200,376,461	5,289,824,962	78.40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24,477,711,423	19,189,437,117	5,288,274,306	78.40
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9,997,000	9,189,536	807,464	91.92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,493,000	1,749,808	743,192	70.19
Administrasi Umum Perangkat Daerah	132,122,400	100,898,546	31,223,854	76.37
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,102,800	1,009,101	93,699	91.50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,216,000	1,095,140	1,120,860	49.42
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,748,700	33,685,664	15,063,036	69.10
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,210,900	3,062,904	1,147,996	72.74
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	990,000	600,000	390,000	60.61
Penyediaan Bahan/Material	55,219,000	44,197,817	11,021,183	80.04
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19,635,000	17,247,920	2,387,080	87.84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,410,132,100	1,151,136,291	258,995,809	81.63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,055,000	8,430,000	625,000	93.10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186,497,700	137,550,634	48,947,066	73.75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,214,579,400	1,005,155,657	209,423,743	82.76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199,575,920	177,416,720	22,159,200	88.90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97,312,000	78,537,450	18,774,550	80.71
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42,263,920	39,397,520	2,866,400	93.22
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,000,000	59,481,750	518,250	99.14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23,971,400	19,647,000	4,324,400	81.96
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,971,400	19,647,000	4,324,400	81.96
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4,486,580,000	4,367,472,535	119,107,465	97.35
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2,425,580,000	2,375,709,471	49,870,529	97.94
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2,275,580,000	2,241,232,386	34,347,614	98.49
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	150,000,000	134,477,085	15,522,915	89.65
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	250,000,000	215,441,682	34,558,318	86.18
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	50,000,000	26,645,818	23,354,182	53.29
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	200,000,000	188,795,864	11,204,136	94.40
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,811,000,000	1,776,321,382	34,678,618	98.09
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,811,000,000	1,776,321,382	34,678,618	98.09
PROGRAM PENYEDIAAN DAN	8,465,368,400	8,359,985,217	105,383,183	98.76

PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
Pengembangan Prasarana Pertanian	1,365,368,400	1,277,603,330	87,765,070	93.57
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1,323,365,000	1,235,774,991	87,590,009	93.38
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	42,003,400	41,828,339	175,061	99.58
Pembangunan Prasarana Pertanian	7,100,000,000	7,082,381,887	17,618,113	99.75
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7,100,000,000	7,082,381,887	17,618,113	99.75
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	816,725,000	639,177,889	177,547,111	78.26
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	776,725,000	600,044,587	176,680,413	77.25
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	776,725,000	600,044,587	176,680,413	77.25
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	40,000,000	39,133,302	866,698	97.83
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	40,000,000	39,133,302	866,698	97.83
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	686,000,000	662,540,656	23,459,344	96.58
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	686,000,000	662,540,656	23,459,344	96.58
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	421,000,000	410,883,250	10,116,750	97.60
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	265,000,000	251,657,406	13,342,594	94.97

Realisasi anggaran tahun 2023 dari segi keuangan rata-rata sudah mendekati 100 %. Hanya Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang belum tercapai

100%, hal ini karena pagu sebesar Rp. 120.000.000,- memang dianggarkan untuk operasional pengobatan penyakit PMK. Selanjutnya tidak terrealisasi karena tidak ada kejadian kasus PMK selama tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menyajikan keberhasilan dan kegagalan yang di tahun 2023. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- b. Hasil kinerja program yang tercermin dalam IKU, secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan, namun ada juga sasaran yang tidak dapat tercapai namun tetap mengalami peningkatan.
- c. Hasil kinerja keuangan, capaian sasaran secara umum telah mampu mendekati seratus persen. Sisanya tidak diamprah karena efisiensi.

4.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja diatas, maka ada beberapasarana-saran yang perlu disampaikan yaitu:

1. Dalam penyusunan rencana kerja hendaknya selalu berpedoman kepadaperencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Perlu ditingkatkan kompetensi aparat (kualitas SDM) Dinas Pertanian untukmencapai prioritas sasaran berdasarkan Renstra.
3. Perlu selalu ditingkatkan sinkronisasi koordinasi dan kerja sama baik levelhorizontal maupun vertikal.
4. Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana untuk kelancaran administrasi dankinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
5. Kebijakan yang dapat diambil antara lain:

- Meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan pertanian,
- Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian serta infrastruktur pertanian.
- Penguatan petugas pengendalian organisme pengganggu tanaman (POPT).
- Meningkatkan promosi dan pengembangan kualitas komoditas pertanian.
- Menyediakan benih unggul bermutu bagi petani pelaku usaha perkebunan.
- Menentukan kawasan agrobisnis peternakan yang potensial untuk dikembangkan.
- Sosialisasi bahaya penyakit hewan menular dan zoonosis.
- Peningkatan jumlah petugas respon cepat tentang penanggulangan penyakit zoonosis

Akhir kata semoga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan untuk tahun berikutnya.

Lampiran 1. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Pertanian Kab Tabanan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD
		URUSAN PERTANIAN				40,262,336,447		38,596,687,073		36,524,429,820		37,855,866,776		38,985,364,948		40,148,814,173
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Peningkatan nilai SAKIP	Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			100%	35,932,259,947	100%	31,164,187,223	100%	31,086,876,688	100%	31,582,941,270	100%	32,252,939,517	100%	33,101,336,416
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	7,000,000	100%	8,000,000	100%	9,000,000	100%	10,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah tersusunnya dokumen renstra renja		2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	4,000,000	2 Dokumen	4,500,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,500,000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah tersusunnya dokumen LKjIP	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	33,471,659,862	100%	29,005,211,423	100%	28,954,004,008	100%	29,030,645,179	100%	29,532,031,849	100%	30,384,817,721
Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	33,444,270,786	100%	28,977,711,423	100%	28,925,129,008	100%	29,000,326,429	100%	29,500,197,161	100%	30,351,391,299
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	22,050,000	100%	23,152,500	100%	24,310,125

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Indikator : Jumlah tersusunnya laporan keuangan	2 dokumen	7,389,076	2 dokumen	7,500,000	2 dokumen	7,875,000	2 dokumen	8,268,750	2 dokumen	8,682,188	2 dokumen	9,116,297
			Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	192,119,010	100%	227,152,200	100%	302,562,460	100%	324,707,593	100%	341,927,488	100%	359,023,863
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5,000,000	100%	2,223,000		2,334,150		2,450,858		2,573,400		2,702,070
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Tersedianya Peralatan Rumah tangga Lainnya	100%	6,000,000	100%	4,444,700	100%	4,666,935	100%	4,900,282	100%	5,145,296	100%	5,402,561
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	61,626,500	100%	50,000,000	100%	55,950,000	100%	58,747,500	100%	61,684,875	100%	64,769,119

				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	8,428, 000	100%	8,425,0 00	100%	11,84 9,900	100%	12,442,3 95	100%	13,064, 515	100%	13,717, 740
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanganIndi kator: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	100%	2,160, 000	100%	1,980,0 00	100%	3,300 ,000	100%	3,465,00 0	100%	3,638,2 50	100%	3,820,1 63
				Penyediaan Bahan/Materi al Indikator: Tersedianya bahan/materia l	100%	50,439 ,510	100%	110,439 ,500	100%	115,9 61,47 5	100%	121,759, 549	100%	127,847 ,526	100%	134,239 ,902
				Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	100%	58,465 ,000	100%	39,640, 000	100%	98,00 0,000	100%	102,900, 000	100%	108,045 ,000	100%	113,447 ,250

				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator: Terpeliharanya arsip pada SKPD	0	0	100%	10,000,000	100%	10,500,000	100%	18,042,010	100%	19,928,626	100%	20,925,057
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	575,705,175	100%	238,378,500	100%	50,442,865	100%	257,500,000	100%	325,110,451	100%	156,680,908
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	575,705,175	100%	238,378,500	100%	50,442,865	100%	257,500,000	100%	325,110,451	100%	156,680,908
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		100%	1,546,524,400	100%	1,547,503,900	100%	1,624,879,095	100%	1,706,123,050	100%	1,791,598,786	100%	1,881,178,725

			Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Tersedianya jasa surat Menyurat	100%	8,625,000	100%	8,625,000	100%	9,056,250	100%	9,509,063	100%	10,154,099	100%	10,661,804
				Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	286,495,000	100%	286,499,500	100%	300,824,475	100%	315,865,699	100%	331,658,984	100%	348,241,933
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,251,404,400	100%	1,252,379,400	100%	1,314,998,370	100%	1,380,748,289	100%	1,449,785,703	100%	1,522,274,988

			Pemeliharaan n Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpelihara nya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%	141,25 1,500	100%	140,941 ,200	100%	147,9 88,26 0	100%	255,965, 448	100%	253,270 ,943	100%	309,635 ,200
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas		100%	106,66 1,500	100%	106,651 ,200	100%	111,9 83,76 0	100%	117,582, 948	100%	123,462 ,095	100%	129,635 ,200

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	100%	34,590,000	100%	34,290,000	100%	36,004,500	100%	138,382,500	100%	129,808,848	100%	180,000,000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian			10%	716,826,500	10%	1,690,632,950	10%	804,340,902	10%	1,291,268,759	10%	1,406,887,381	10%	1,573,668,180
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase		50%	463,076,500	50%	228,132,950	55%	659,601,527	60%	1,151,295,690	65%	1,269,008,069	70%	1,444,474,631

Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian Indikator: Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		0		123,500,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator: Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung	10 Kec	463,076,500	10 Kec	104,632,950	10 Kec	559,601,527	10 Kec	951,295,690	10 Kec	1,069,008,069	10 Kec	1,244,474,631
Pengelolaan Sumber Daya		1 jenis	103,750,000	2 jenis	95,000,000	3 jenis	114,384,375	4 jenis	120,103,594	5 jenis	126,108,773	6 jenis	126,108,773

			Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	0	0	0	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	Pemanfaatan SGD Hewan /Tanaman Indikator: Jumlah Pemanfaatan SGD Hewan/Tanaman	0	103,750,000	4 jenis tanaman	0	4 jenis tanaman	114,384,375	4 jenis tanaman	120,103,594	4 jenis tanaman	126,108,773	4 jenis tanaman	126,108,773
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota Lain		15 ekor dan 18500 pohon/Stek	150,000,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1,367,500,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	30,355,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	19,869,475	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	11,770,539	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	3,084,776
			Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain Indikator: Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	150,000,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1,367,500,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	30,355,000	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	19,869,475	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	11,770,539	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	3,084,776

Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Pternakan		10%	3,062,500,000	10%	4,780,491,900	10%	4,225,024,730	10%	4,398,775,472	10%	4,726,238,737	10%	4,857,525,899
			Pengembangan Prasarana Pertanian	50%	200,000,000	52%	1,315,116,900	54%	402,003,400	56%	499,178,893	58%	484,796,993	60%	507,929,320
			Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	n/a	0	3 dokumen	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B Indikator: Tersusunnya Perda Lp2B, KP2B dan LCP2B	n/a	0	1 dokumen	47,500,000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	n/a	0	1 dokumen	47,500,000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0

			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator: Persentase meningkatnya Hasil Pertanian, tersedianya Prasarana Pertanian	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	1,220,16,900	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	441,845,165	1 dokumen	424,596,579	1 dokumen	444,718,885
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Indikator: Tersedianya Data Statistik Pertanian	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	47,500,000	1 Tahun	52,003,400	1 Tahun	57,333,728	1 Tahun	60,200,414	1 Tahun	63,210,435
	Pembangunan Prasarana			57 unit	2,862,500,000	77 unit	3,465,375,000	97 unit	3,823,021,330	117 unit	3,899,596,579	137 unit	4,241,441,744	157 unit	4,349,596,579

		Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatn ya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha TaniIndikator: tersedianya Prasarana Pertanian	7 unit	837,50 0,000	32 unit	2,795,3 75,000	49 unit	1,798 ,021, 330	67 unit	1,724,59 6,579	82 unit	1,916,4 41,744	100 unit	1,724,5 96,579
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator: Tersedianya Embung Pertanian dalam Kondisi Baik	1 unit	175,00 0,000	4 unit	0	5 unit	175,0 00,00 0	6 unit	175,000, 000	7 unit	175,000 ,000	8 unit	175,000 ,000
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Terbangunnya dan Terehabilitasin ya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	40 unit	1,000, 000,00 0	47 unit	370,000 ,000	52 unit	1,000 ,000, 000	58 unit	1,150,00 0,000	65 unit	1,300,0 00,000	72 unit	1,600,0 00,000

Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Indikator: Terbangun dan terehabilitasin ya Dam Parit dalam kondisi baik	2 unit	350,000,000	6 unit		8 unit	350,000,000	10 unit	350,000,000	12 unit	350,000,000	14 unit	350,000,000
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator: Terbangun dan Terehabilitasin ya Pintu Air dalam Kondisi Baik	6 unit	100,000,000	10 unit		12 unit	100,000,000	14 unit	100,000,000	16 unit	100,000,000	18 unit	100,000,000
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Indikator: Terbangun dan Terehabilitasin ya Rumah Potong Hewan dalam Kondisi Baik	1 unit	0	1 unit		1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0

				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Indikator: Terbangun dan Terehabilitasi ya Balai Penyuluh di Kecamatan	10 unit	200,00 0,000	10 unit		10 unit	200,00 00,00 0	10 unit	200,000, 000	10 unit	200,000 ,000	10 unit	200,000 ,000
				Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya Indikator: Terbangun dan Terehabilitasi ya Prasarana Lainnya dala Kondisi Baik	3 unit	200,00 0,000	3 unit	300,000 ,000	3 unit	200,00 00,00 0	3 unit	200,000, 000	3 unit	200,000 ,000	3 unit	200,000 ,000
Tujuan 2: Meningkatn ya Produktivitas Komoditas	Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Pernaka	PROGRAM PENGEND ALIAN KESEHAT AN HEWAN			95%	223,2 50,00 0	96%	470,00 0,000	97%	236, 250, 000	98%	238,612, 525	99%	250,54 3,125	100%	263,07 0,282
			Penjaminan Kesehatan Hewan,		6000 ekor	188,25 0,000	8000 ekor	470,000 ,000	11000 ekor	236,2 50,00 0	14000 ekor	198,095, 650	17000 ekor	208,000 ,406	21000 ekor	218,400 ,427

Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	n Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat at veteriner	DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat at veteriner	Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	188,250,000	10 Kecamatan	470,000,000	10 Kecamatan	236,250,000	10 Kecamatan	198,095,650	10 Kecamatan	208,000,406	10 Kecamatan	218,400,427
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		100 dokumen	35,000,000	110 dokumen	0	120 dokumen	0	130 dokumen	40,516,875	140 dokumen	42,542,719	150 dokumen	44,669,855
			Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator: Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	100 dokumen	35,000,000	110 dokumen	0	120 dokumen	0	130 dokumen	40,516,875	140 dokumen	42,542,719	150 dokumen	44,669,855
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas	Sasaran 4: Pengembangan Sumber	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			40%	163,750,000	45%	491,375,000	50%	171,937,500	55%	172,134,375	60%	174,378,094	65%	176,606,698

as Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Daya Manusia Pertanian Indikator: Meningkatnya Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	N Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas		25%	163,75 0,000	27%	491,375 ,000	30%	171,9 37,50 0	34%	172,134, 375	39%	174,378 ,094	45%	176,606 ,698
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Programa Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten	144 Buku	163,75 0,000	144 Buku	277,625 ,000	144 Buku	171,9 37,50 0	144 Buku	172,134, 375	144 Buku	174,378 ,094	144 Buku	176,606 ,698
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Programa Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten				213,750 ,000								

Lampiran SK



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/531/03/HK/2024

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023

kepada Bupati Tabanan sebagai laporan kinerja sebagaimana yang jelas ditetapkan dalam penetapan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

- KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor Rekening 3.27.01.2.01.0007.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 5 Maret 2024

an. BUPATI TABANAN
KERALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN,



I MADE SUBAGIA, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603081989031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kabupaten Tabanan;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Tabanan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Made Subagia, S.Pi, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 9 Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan,

I Made Subagia, S.Pi, M.M.

	Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	dikurangi produktivitas tahun (n-1) dibagi produktivitas tahun (n-1) dikalikan seratus persen		
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner/	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat veteriner	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi Jumlah Ternak dikalikan Seratus Persen	97%	801.725.000
4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	Jumlah Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian yang Dibina oleh Penyuluh dibagi Total Jumlah Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian dikalikan Seratus Persen	50%	686.000.000
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Distan Tabanan)	Jumlah Realisasi Anggaran Dibagi Jumlah Pagu Anggaran Dikalikan Seratus Persen	100%	30.761.037.083

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 9 Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan,

I Made Subagia, S.Pi, M.M.

LAMPIRAN TAMBAHAN

PERJANJIAN KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	Pengolahan Pasca Panen Produk Pertanian dalam Arti Luas yang Bernilai Ekonomi Tinggi	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi Pelaporan Hewan Rabies Era Baru Aman Unggul Madani, yang dapat diakses oleh masyarakat guna melaporkan kejadian gigitan kepada Unit Respon Cepat untuk penanganan cepat kasus rabies	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah respon Respon Petugas URC}}{\text{Jumlah laporan ke aplikasi}} \times 100$	50 %	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kinerja Wajib					
2.1	Keterjangkauan Informasi Perangkat Daerah di Media Sosial	Publikasi kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial	Jumlah Postingan Perbulan	Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah yang diposting di Media Sosial (fanspage facebook dan instagram)	25	
			Jumlah Minimum "Like" pada setiap postingan	Jumlah "Like" pada setiap Kegiatan Perangkat Daerah yang diposting di Media Sosial (fanspage facebook dan instagram)	30	

2.2	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN dibagi jumlah ASN	90%	
2.3	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan No. 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100%	
2.4	Kepatuhan terhadap Standar pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombusman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	Hijau (81-100)	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 9 Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan,


I Made Subagia, S.Pi, M.M.